

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rusia merupakan sebuah negara besar dan memiliki posisi tawar yang kuat di masyarakat internasional dengan luas wilayah + 17,075,400 km² (One World Nations Online). Rusia merupakan penghubung antara benua Eropa dan Asia, dan juga berbatasan dengan benua Amerika Utara (EENI). Posisi tawar yang kuat dari Rusia itu sendiri tidak dapat terlepas dari Sejarah Uni Soviet yang pernah menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan dahulu, selain itu juga dipengaruhi oleh Sejarah pembentukan negara Federasi Rusia.

Bubaranya Uni Soviet menjadikan Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet yang telah mengubah orientasi, tujuan dan pola formulasi kebijakan serta tindakan politik luar negeri negara Rusia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Rusia dalam hal membentuk kebijakan luar negerinya ditujukan untuk memperkuat kedudukannya di dunia Internasional, tetapi sebagai sebuah negara dengan corak pemerintahan yang otokrasi didalam hal pembuatan Keputusan negara, tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh dari seorang pemimpin negara atau kekuasaan terpusat ditangan satu orang yang disebut Sistem “Superpresidensial”. Menurut Marquis Astople de

Custine dalam "*Letters from Russia*" menyatakan bahwa terdapat kesamaan yang mengesankan antara politik Rusia pada abad ke-18 dan ke-19 dengan pada era Rusia modern dalam hal pemusatan kekuasaan di tangan satu orang (white, 1983).

Pasca Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 yang merupakan bencana geopolitik terbesar di abad ke-20 sekaligus momentum akan keruntuhan komunisme, namun Rusia saat ini masih merupakan negara besar yang berpengaruh baik dalam bidang ekonomi maupun politik, Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya usaha Rusia untuk mempertahankan eksistensinya di dunia internasional meskipun saat ini dikelilingi oleh beberapa bentuk integrasi regional yang mendominasi, seperti Uni Eropa, WTO, dan lain-lain.

Dalam catatan sejarah negara Rusia, Para pemimpin Rusia yang terdahulu tidak memiliki kebijakan yang kuat dalam hal ekonomi dan politik. Rusia mengalami perubahan positif saat kepemimpinan periode kedua dari Vladimir Putin. Vladimir memiliki kebijakan *outlooking* dalam memajukan ekonomi-politik dari Rusia.

Pada masa ini, dalam hal ekspor dan GDP Negara Rusia mengalami peningkatan dan tingkat inflasi dapat ditekan. Namun, dalam hal kebijakan luar negeri Putin dipandang memiliki ciri khas tersendiri dan berani menawarkan salah perekonomian paling dinamis yang berkembang dan menarik di dunia dengan membentuk Uni Ekonomi Eurasia.

Kondisi yang mempengaruhi Rusia dalam hal kepentingan untuk membentuk Uni Ekonomi Eurasia karena telah terjadi perselisihan ekonomi antara Rusia dengan beberapa negara bekas Uni Soviet, seperti Ukraina dan Georgia. Sejak Tahun 2002 telah terjadi pelarangan import anggur Georgia oleh Rusia di tahun 2006 dan adanya langkah-langkah Uni Eropa yang ingin menggabungkan sejumlah negara persemaikmuran ke Uni tersebut serta berlanjutnya agenda *Eastern partnership*.

Uni Ekonomi Eurasia merupakan uni kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh pemimpin negara Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada tanggal 29 Mei 2014 (Time). Pengoperasian Uni Ekonomi Eurasia akan meningkatkan pertukaran perdagangan di antara negara-negara anggotanya dengan lebih mudah setelah sebelumnya terjadi pembentukan Sebuah perjanjian bersejarah Uni Ekonomi Eurasia yang diprakarsai oleh tiga negara pendiri, yakni Presiden Rusia (Vladimir Putin), Presiden Kazakhstan (Nursultan Nazarbayev), dan Presiden Belarus (Alyaksandr Lukashenka) yang ditandatangani di kota Lukashenka) yang ditandatangani di kota Astana dan sebelumnya ketiga negara tersebut telah mendirikan Uni Bea Cukai Eurasia pada tahun 2010 (Deteksi).

Uni Ekonomi Eurasia terbentuk setelah Rusia dan empat negara bekas Uni Soviet pada Selasa 23 Desember 2014 sepakat untuk membentuk aliansi ekonomi baru untuk mendorong integrasi di antara mereka. Sebelumnya, uni ini merupakan rencana bagi Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan dan negara pasca-Soviet lainnya untuk memperkuat integrasi ekonomi dan politik masing-masing

negara menjadi sebuah persatuan supranasional (BBC News). Aliansi yang beranggotakan Rusia, Belarus, Kazakhtan, Armenia, dan Kyrgyzstan tersebut berlaku pada 1 Januari 2015 yang berfungsi untuk memberlakukan perdagangan bebas, Aliansi ini juga mengoordinasikan sistem keuangan para anggotanya, mengatur bersama industri dan kebijakan pertanian, serta mengembangkan jaringan transportasi dan pasar tenaga kerja (Kompas.com).

Ide yang didasarkan pada integrasi Uni Eropa ini diperkenalkan pada Oktober 2011 oleh Vladimir Putin (G. Bryanski), namun pertama kali dikonsepsikan oleh Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev dalam pidato tahun 1994 di Universitas Moskow, kurang dari tiga tahun setelah pembubaran Uni Soviet (The Daily Telegraph, 2011). Rencana yang berisikan sebuah ide akan pembuatan sebuah perdagangan regional untuk menghubungkan dan menghasilkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi eropa dan Asia timur (Radyuhin). Ide tersebut sangat cepat terlihat sebagai sebuah cara untuk menaikkan perdagangan, investasi didalam wilayah dan menyajikan sebuah perimbangan terhadap integrasi barat (Kavkaza V.).

Adapun Tujuan-tujuan dari Uni Ekonomi Eurasia adalah penghapusan secara bertahap atas aturan Bea Cukai internal di negara dan menempatkan tariff luar negeri umum di antara negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, serta menyelaraskan prosedur bea cukai di negara-negara anggota. Para kepala negara dan perdana menteri Rusia, Belarus dan Kazakhstan akan menjadi anggota Dewan Eurasia dan menentukan agenda-agenda Uni Ekonomi Eurasia (The Daily Telegraph).

Selama Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia yang digelar beberapa waktu lalu di Moskow, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyinggung bahwa prinsip dasar Uni Ekonomi Eurasia meliputi hubungan kesamaan, realisme dan saling menghormati. Putin menyatakan kesiapan Uni Ekonomi Eurasia untuk bekerjasama dengan negara-negara tetangga dalam konteks masyarakat negara-negara persemaimuran dan mitra-mitra lainnya di timur dan barat. Presiden Rusia juga menegaskan pentingnya perluasan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia dan arus barang tanpa hambatan-hambatan birokrasi, di mana penyediaan fasilitas khusus dalam konteks ini sangat penting untuk menarik lebih banyak anggota.

Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan persekutuan baru ini akan menghasilkan gabungan *output* ekonomi senilai 4,5 triliun dollar AS, setara sekitar Rp 56.250 triliun dan mensejahterakan 170 juta orang. Integrasi ini berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memperhitungkan kepentingan bersama (Kompas.com).

Integrasi ini berdasarkan integrasi yang dibangun negara-negara Eropa Barat berupa Uni Eropa sebagai sebuah integrasi yang berhasil menaikkan ekonomi negara-negara anggotanya sehingga inisiatif Putin yang digagas dalam sebuah artikel bulan Oktober 2011 di harian Izvestia dengan tujuan untuk mengimplementasikan integrasi serupa Uni Eropa. Inisiatif ini didukung oleh beberapa negara pecahan Uni Soviet (Post-Soviet States), namun dalam hal pencapaian kepentingan Rusia dalam

pembentukan Uni Ekonomi Eurasia menghadapi tantangan besar yakni adanya upaya Barat untuk menarik sejumlah negara di wilayah luar dekat Rusia seperti Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Hal ini ditegaskan oleh para pejabat Uni Eropa yang berulang kali memperingatkan bahwa keanggotaan Ukraina di Uni Ekonomi Eurasia adalah garis invaliditas terhadap kesepakatan perdagangan bebas dan pada akhirnya keanggotaan negara itu di Uni Eropa akan dicabut (IRIB Indonesia). Namun hal tersebut seperti tidak mempengaruhi Vladimir Putin jika melihat pernyataan yang telah terlebih dahulu dikeluarkan olehnya pada tanggal 29 Mei 2014. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa "Hari ini kami membentuk sebuah kekuatan, menarik pusat dari perkembangan ekonomi dan sebuah pasar regional besar yang menyatukan lebih dari 170 juta masyarakat." Tetapi hal tersebut mendapatkan bantahan dari Bakytzhan Sagintayev, Perdana menteri Kazakhstan dengan mengatakan bahwa "kami tidak membentuk sebuah organisasi politik, kami murni membentuk sebuah uni ekonomi. Ini adalah sebuah alat pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Kami tidak ikut campur terhadap apa yang dilakukan Rusia dalam bidang politik dan Rusia tidak memberitahukan kita kebijakan luar negeri apa yang ingin dicapai (The New York Times).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalampembahasan lebih lanjut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa Rusia pada era Vladimir Putin membentuk Uni Ekonomi Eurasia di Tahun 2015?”

C. Kerangka Dasar Teori

Untuk membantu menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam Hubungan Internasional, maka diperlukan teori ataupun konsep yang relevan terkait dengan suatu permasalahan tersebut, sehingga pada penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan oleh Penulis dalam permasalahan ini, mengacu pada :

1. Model Aktor Rasional

Pada uraian mengapa Rusia pada era Vladimir Putin membentuk Uni Ekonomi Eurasia di Tahun 2015, Penulis menitik beratkan pada tingkat politik luar negeri Rusia dalam pencapaian tujuan nasionalnya. Untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas, Penulis menggunakan Model Aktor Rasional.

Dalam studi Hubungan Internasional, kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (rational action) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional dan hanya dapat berarti sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, serta sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa (Warsito, 1998).

Teorisasi dalam Hubungan Internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik.

Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional untuk dapat mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan

keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

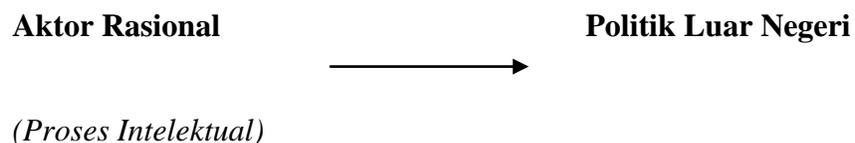
Menurut Graham T. Allison, Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (decision maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Olton, 1999). Sehingga di dalam model aktor rasional dapat digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atau alternatif menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya dan juga dapat memperoleh informasi yang cukup, sehingga dapat melakukan penelusuran terhadap alternatif kebijakan yang akan dilakukan atau sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa Graham T. Allison memberikan gambaran bahwa politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan. Dalam proses pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dimana pemerintah

dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada, maka unit analisis pada pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari bangsa itu sendiri.

Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan pada umumnya, keputusan-keputusan terutama berkaitan dengan politik luar negeri di buat secara rasional dan dengan proses yang tidak mudah (instan). Karena itulah, Graham T. Allison beranggapan bahwa model ini adalah model yang tepat untuk diterapkan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

Model Aktor Rasional



Mohtar Mas'oeed dalam bukunya, "*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*" mengatakan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai

suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahapan-tahapan intelektual dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh dan berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.” (Mas’oed M. , 1990)

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel 1.1

**ALTERNATIF-ALTERNATIF PEMBUATAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI
RUSIA**

Alternatif	Keuntungan	Kerugian
Alternatif 1 (Rusia mendukung untuk membentuk integrasi Ekonomi (Uni Ekonomi Eurasia))	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pertukaran perdagangan diantara negara anggota, dalam hal ini negara bekas Uni soviet secara lebih mudah2. Memperkuat pengaruh Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet3. Membentuk kekuatan tandingan terhadap hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam hal perekonomian.	<ol style="list-style-type: none">1. Terancamnya hubungan antara Rusia dan Uni Eropa.
Alternatif 2	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi tensi dan ketegangan politik antara Rusia	<ol style="list-style-type: none">1. Terancamnya eksistensi negara Rusia di antara

<p>(Rusia memutuskan untuk tidak membentuk integrasi ekonomi (Uni Ekonomi Eurasia))</p>	<p>dengan Uni Eropa</p>	<p>negara-negara bekas Uni Soviet karena adanya upaya Barat untuk menarik sejumlah negara di wilayah luar dekat Rusia seperti Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).</p> <p>2. Terancamnya pengaruh Rusia di antara negara-negara bekas Uni Soviet seiring dengan usaha perluasan anggota dari NATO maupun Uni Eropa.</p> <p>3. Munculnya hambatan perdagangan antara Rusia dengan beberapa negara bekas Uni Soviet, seiring dengan terjadinya berbagai macam konflik antara Rusia</p>
---	-------------------------	--

		dengan negara-negara bekas Uni Soviet.
--	--	---

Dalam proses ini Rusia akan memilih alternatif terbaik bagi Rusia dari alternatif-alternatif yang ada. Pemilihan alternatif ini tentunya menuntut kemampuan intelektual aktor rasional di dalam memutuskan alternatif mana yang dipilih sebagai kebijakan luar negeri yang dinilai dapat memberikan keuntungan. Dari alternatif yang ada, Rusia di bawah pemerintahan Vladimir Putin cenderung akan lebih memilih alternatif yang menguntungkan sebagai kebijakan luar negerinya, yaitu mendukung untuk membentuk integrasi ekonomi (Uni Ekonomi Eurasia).

2. Teori Integrasi

Menurut Walter S, Jones dalam bukunya *“Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2”*, mengatakan bahwa Integrasi Internasional merupakan proses pencapaian kondisi supranasional dimana urusan yang semula ditangani pemerintah nasional beralih ke unit-unit politik yang lebih besar. Integrasi internasional secara singkat didefinisikan sebagai proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat yang baru dan lebih besar, yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yurisdiksi yang semula berada ditangan negara bangsa (Kusumohamidjojo, 1993).

Kemudian Konsep Integrasi didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh Joseph Nye dengan membagi ke dalam beberapa bagian atau dimensi untuk menciptakan indikator agar dapat mengukurnya. Konsep Integrasi bisa dibagi menjadi Integrasi Ekonomi (pembentukan suatu ekonomi transnasional), integrasi sosial (pembentukan masyarakat transnasional) dan Integrasi politik (pembentukan sistem transnasional).

Terkait permasalahan ini, maka penulis akan mencoba menjelaskan permasalahan terkait pada kedua bentuk konsep Integrasi, yakni integrasi ekonomi dan politik.

1. Integrasi Ekonomi

Menurut Holzman, integrasi ekonomi adalah situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Definisi ini menggambarkan bahwa terdapat lembaga yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa dan faktor produksi di dalam sebuah kawasan. Hal ini berkesinambungan dengan tujuan dari pembentukan Uni Ekonomi Eurasia dalam mencapai sebuah bentuk integrasi dengan beragam bentuk kerjasama yang sudah menjadi komitmen antar negara anggota Uni Ekonomi Eurasia antara lain kerjasama di sektor energi, industri, pertanian dan transportasi. Terlebih jika melihat dari keberadaan Uni Ekonomi Eurasia yang

tidak bisa dianggap sebelah mata, selain itu juga dipengaruhi oleh kapasitas perekonomian Rusia yang cukup besar, baik untuk kawasan Uni Eropa maupun dunia. Pengoperasian Uni Ekonomi Eurasia itu sendiri yang akan meningkatkan pertukaran perdagangan di antara negara-negara anggotanya dengan lebih mudah.

Terlebih Presiden Rusia, Vladimir Putin tengah menyusun peraturan yang bertujuan untuk mengeliminasi dolar AS dan euro dalam perdagangan dengan China melalui Transaksi Rubel-Yuan untuk mengubah Keuangan Dunia, sehingga upaya penciptaan pasar keuangan tunggal antara Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan negara-negara lain dari bekas Uni Soviet dapat segera terlaksana melalui kerjasama Rusia dengan China dalam hal penggunaan Yuan China untuk menumbangkan Hegemoni Dolar AS. Terkait kepentingan Rusia dengan adanya pemberlakuan Uni Ekonomi Eurasia bisa menjadi solusi strategis Moskow karena sejak lama Rusia telah mendorong negara-negara untuk bergabung dengan uni tersebut untuk menandingi Uni Eropa sehingga dapat menyaingi Uni Eropa, Cina dan Amerika Serikat dalam hal perekonomiannya.

2. Integrasi Politik

Charles Pentland 1973 di dalam *International Theory and European Integration* mendefinisikan bahwa Integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat,

yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah “community”.

Menelisik dari penjelasan di atas, bahwa telah terjadi pembentukan politik, yang dalam hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah kesepakatan tentang perluasan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia dan arus barang tanpa hambatan-hambatan birokrasi, di mana terdapat penyediaan fasilitas khusus yang terjadi didalam satu komunitas yang diciptakan, selain itu terlihat upaya Rusia dalam hal pembuatan kesepakatan tersebut membawa negara anggota ke tingkat integrasi yang baru dan mewujudkan integrasi terkait Uni Ekonomi Eurasia, Selain itu, pembentukan ini merupakan langkah untuk menghadapi Uni Eropa yang ingin menggabungkan sejumlah negara persemakmuran dari Uni soviet ke Uni Eropa sehingga cara yang dilakukan Rusia dalam hal ini Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia merupakan sebuah pilihan rasional yang tepat dengan menggabungkan negara-negara yang terpisah dari Uni Soviet atau bekas uni soviet ke ke Uni Ekonomi Eurasia.

Langkah yang ditempuh oleh Rusia merupakan sebuah langkah perubahan yang bernilai signifikan untuk dapat membentuk sebuah

Uni Soviet yang modern “Soviet Union light.” Dengan tahapan awal pembentukan dalam menciptakan pasar besar bersama di kawasan negara-negara independen persemakmuran uni soviet, memfasilitasi dan memudahkan perdagangan di antara negara-negara yang telah memisahkan diri dari Uni Soviet, Rusia dalam hal ini ingin menciptakan sebuah pasar besar dalam konteks peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tetapi dalam konteks yang berbeda dengan upaya menekan besarnya pengaruh dari hegemoni barat.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teoritik yang diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam langkah-langkah proses pembentukan Uni Ekonomi Eurasia terkait kepentingan ekonomi-politik Rusia dalam pembentukan Uni Ekonomi Eurasia adalah sebagai berikut :

4. Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia dalam hal kepentingan ekonomi adalah Rusia berupaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara memperbesar intensitas kegiatan ekonomi dengan negara-negara bekas Uni Soviet serta solusi strategis Moskow untuk menyaingi perekonomian Uni Eropa, Cina dan Amerika Serikat.

5. Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia dalam hal kepentingan politik adalah pilihan rasional Rusia untuk menggabungkan negara bekas Uni Soviet ke dalam pembentukan satu komunitas yang diciptakan yang berguna untuk mengurangi hegemoni barat.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

6. Menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan metodologi yang sesuai dengan ranah ilmu hubungan internasional
7. Menjelaskan tentang kepentingan ekonomi-politik Rusia terkait pembentukan Uni Ekonomi Eurasia pada tahun 2015.
8. Mengetahui tujuan dari pelaksanaan dan pembentukan terkait berdirinya Uni Ekonomi Eurasia.
9. Sebagai Prasyarat untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penentuan metodologi dilakukan agar penelitian menjadi sistematis. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu analisis penelitian yang didasarkan pada

data-data yang dikaji atas dasar realitas data yang diperoleh dan membentuk suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris atau menelaah suatu prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus, sehingga akan menghasilkan penjelasan deskriptif untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Teknik pengumpulan data berdasarkan metode *library research* (penelitian kepustakaan), dimana data diambil melalui sumber-sumber yang valid yakni berupa data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, makalah-makalah, surat kabar, artikel dan juga media elektronik serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menentukan jangkauan penelitian dari sejak adanya Rencana dari Vladimir Putin untuk mengubah Uni Bea Cukai menjadi Uni Eurasia yang mencakup seluruh Eurasia sebagai cikal-bakal pembentukan Uni Ekonomi Eurasia yang merupakan kebijakan politik luar negeri Rusia dan memfokuskan pada tahun 2014-2015 dimana terjadi proses ratifikasi terhadap Uni kerjasama ekonomi tersebut (Uni Ekonomi Eurasia).

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

- BAB II Merupakan Bab yang akan mendeskripsikan secara umum kondisi ekonomi negara Rusia serta kebijakan ekonomi para pemimpin negara Rusia sejak pasca runtuhnya komunisme hingga menjadi federasi Rusia dimana masa terjadinya proses pembentukan Uni Ekonomi Eurasia.
- BAB III Merupakan Bab yang akan memaparkan tentang Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia yang merupakan sebuah kebijakan yang akan direalisasikan oleh Vladimir Putin pada tahun 2015.
- BAB IV Merupakan Bab yang akan menjelaskan tentang kepentingan ekonomi-politik Rusia dalam upaya pembentukan Uni Ekonomi Eurasia.
- BAB V Merupakan Bab yang akan memaparkan sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.